

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Legitimasi**

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. O'Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat, Gray et al. (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004). Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat.

Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam Fitriyani (2012) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (congruent) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan

kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat

## 2.2 Pengertian Aset Tetap

Pengetian Aset tetap menurut IAI, PSAK No.16 ( 2015 : 16.2 ) par. 6 adalah : Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dari berbagai defini di atas dapat di tarik, kesimpulan bahwa aset dapat di sebut aset tetap apabila mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. berupa wujud fisik.
2. bersifat permanen.
3. digunakan dalam operasi perusahaan.
4. tidak dimaksudkan dijual kembali.
5. memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun.

## 2.3. Pengelompokan aset tetap

Pengelompokan berdasarkan penyusutan mengenal 2 (dua) macam jenis aset tetap yaitu :

1. *Depreciated Plant Asets*, yaitu : aset tetap yang mengalami penurunan manfaat melalui penyusutan yang dilakukan perusahaan, seperti : *Building* (bangunan), *Equipment* (peralatan), *Machinery* (mesin), *Inventaris*, Jalan dll.
2. *Undepreciated Plant Asets*, yaitu : aset tetap yang mempunyai manfaat relatif tetap selama masa penggunaannya, karena itu tidak perlu di susutkan nilainya, seperti *Land* (tanah).

Jadi secara umum penggolongan aset tetap untuk tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan yang di bagi dua yaitu: aset yang disusutkan dan aset yang tidak disusutkan.

Aset tetap berdasarkan jenisnya, dapat di bedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Tanah (*land*)
- b. Bangunan (*building*)

- c. Mesin (*machinery*).
- d. Kendaraan.
- e. Perlengkapan kantor (*Office Furniture*).
- f. Peralatan kantor.

Sedangkan dalam PSAK (IAI, 2015 : 16.13) untuk mengklasifikasi aset tetap adalah suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut ini contoh kelompok aset yang terpisah :

- a. Tanah
- b. Tanah dan Bangunan
- c. Mesin
- d. Kapal
- e. Pesawat udara
- f. Kendaraan bermotor
- g. Perabot
- h. Peralatan kantor

#### **2.4 Pengakuan awal perolehan Aset Tetap**

Komponen Biaya Perolehan menurut PSAK Nomor 16 Tahun 2015 tentang Aset Tetap meliputi:

- a) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.
- b) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Menurut (PSAK, 2011) biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam harga perolehan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya imbalan kerja
- b. Biaya persiapan tempat (Lahan untuk pabrik)
- c. Biaya handling dan penyerahan awal
- d. Biaya perakitan dan instalasi
- e. Biaya pengujian terhadap aset tetap (baik atau tidak baik, layak atau tidak layak)
- f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur

Biaya perolehan dari aktiva tetap yang dibangun sendiri (Wild, 2009) terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya *overhead* tidak langsung yang masuk akal (*reasonable amount of indirect overhead cost*) seperti biaya depresiasi mesin yang digunakan untuk konstruksi, biaya perancangan bangunan, biaya izin bangunan dan asuransi selama konstruksi.

Dalam pengakuan biaya perolehan aktiva yang dibangun sendiri ini mengandung permasalahan mengenai dua hal, yaitu: (1) Apakah aktiva tetap yang dibangun sendiri harus dibebani *fixed overhead*? dan (2) Apakah bunga atas dana yang diinvestasikan (bunga konstruksi) dikapitalisasikan atau tidak?

(Schroeder, 2005:275) mengemukakan tiga alternatif untuk mengatasi masalah *fixed overhead* yaitu: (1) *Fixed Overhead* tidak perlu dibebankan ke aktiva tetap, (2) Hanya *incremental fixed overhead* saja yang dibebankan dan (3) Dibebankan *fixed overhead* dengan cara yang sama seperti mengalokasi *overhead* ke produk lain. (Kieso, 2008:475) perusahaan seharusnya membebankan *fixed overhead* menjadi biaya dari aktiva tetap secara *pro rata portion*.

Permasalahan kedua mengenai bunga konstruksi, (Kieso, 2008:475) mengemukakan tiga pendekatan yaitu: (1) Bunga tidak dikapitalisasikan, (2) Konstruksi dibebankan dengan semua biaya dana yang digunakan (*costs of fund employed*) baik yang teridentifikasi maupun tidak dan (3) Konstruksi hanya dibebankan biaya bunga aktual yang terjadi selama proses konstruksi. Porter dan Norton (2005) jumlah bunga yang dikapitalisasikan terhadap biaya perolehan aset

berdasarkan beban akumulasi rata-rata (*average accumulated expenditures*). Hal ini disebabkan nilai tersebut menunjukkan rata-rata jumlah uang yang terkait dengan proyek selama periode konstruksi.

(Kieso, 2008:484) mengungkapkan aktiva tetap yang diperoleh melalui penukaran suatu aktiva nonmoneter lainnya harus dicatat berdasarkan nilai wajar (*fair value*) aktiva yang diserahkan atau nilai wajar dari aktiva yang diterima, tergantung bukti yang lebih mendukung. Selain itu *gains* atau *losses* dari transaksi pertukaran boleh diakui jika transaksi memiliki *commercial substance*, yaitu jika transaksi pertukaran menghasilkan perubahan arus kas di masa mendatang. Jika transaksi tidak memiliki *commercial substance* rugi diakui sedangkan laba diakui jika terdapat kas yang diterima dari transaksi pertukaran itu.

PSAK No.16 (IAI, 2007) biaya perolehan aktiva tetap dari pertukaran aktiva non-moneter adalah nilai wajar aktiva yang diserahkan atau aktiva yang diterima apabila nilai wajar aktiva yang diterima lebih handal. Schroeder (2005:278) mengemukakan aktiva tetap yang berasal dari hibah (*donated assets*) dicatat berdasarkan *fair market value*. Argumen ketentuan ini adalah perusahaan tidak memiliki bukti handal atas perolehan aktiva tetap tersebut karena secara material tidak ada pengorbanan ekonomis perolehannya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.30 (IAI,2007:30.16) aktiva tetap yang berasal dari *leasing* dicatat sebesar nilai wajar aset yang disewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

## **2.5 Pengukuran setelah pengakuan awal aset tetap**

Pengeluaran - pengeluaran setelah perolehan aset tetap terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pada dasarnya pengeluaran-pengeluaran tersebut diatas dapat dikelompokkan menjadi :

### **1. Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*)**

Pengeluaran – pengeluaran untuk aset tetap yang bermanfaatnya dinikmati

tidak lebih dari satu periode akuntansi.

## 2. Pengeluaran modal (*capital expenditures*).

Pengeluaran untuk aset tetap yang manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu periode akuntansi. Jenis pengeluaran yang bersifat demikian dicatat sebagai tambahan bagi harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

PSAK (IAI, 2015:16.11) Perusahaan dapat memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

### a. Model biaya

Setelah di akui sebagai aset, aset tersebut dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset

### b. Model revaluasi

Setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal, dan dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi pada tanggal revaluasi.

### c. Nilai wajar

adalah nilai di mana suatu aset dapat ditukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

## 2.6 Penyusutan Aset tetap

Pengertian penyusutan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah Alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. (IAI, 2015:16.3). Secara berkala semua aset tetap, kecuali tanah akan mengalami penyusutan atau penurunan kemampuan dalam menyediakan manfaat. Dengan adanya penyusutan, maka nilai dari aset tetap tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai dari manfaat yang dimiliki aset tersebut. Agar nilai aset tetap dapat memiliki nilai dari manfaat yang dimilikinya, maka perlu dilakukan pengalokasian manfaat atas aset tetap ke dalam akumulasi biaya secara sistematis, berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap.

(IAI, 2015:16.4) pengertian umur manfaat adalah periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh perusahaan, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan akan diperoleh oleh perusahaan.

Pengertian nilai residu dari aset menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah di kurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya. (IAI,2015:16.3)

Untuk menghitung penyusutan dapat dilakukan beberapa metode perhitungan. Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode berdasarkan kriteria :

#### **a. Berdasarkan Waktu.**

Metode ini menghubungkan biaya penyusutan dengan perjalanan waktu. Taksiran umur kegunaan dari aset tetap dinyatakan dalam bentuk satuan waktu, biasanya tahun. Metode ini terdiri dari :

##### **1. Metode garis lurus ( straight line menthod)**

Beban penyusutan dibagi sama rata selama masa manfaat aset yang bersangkutan, setelah dikurangi dengan estimasi nilai residu yang wajar. Rumus untuk menghitung penyusutan metode garis lurus yaitu :

$$\text{Beban penyusutan / tahun} = \frac{\text{Harga perolehan (HP) - Nilai residu}}{\text{Umur manfaat}}$$

##### **2. Metode Saldo Menurun**

Dalam metode penyusutan saldo menurun yang menyajikan penyusutan dalam jumlah yang terus menurun dari tahun ke tahun . Rumus untuk menghitung penyusutan metode saldo menurun yaitu :

$$\text{Beban penyusutan} = \text{Tarif penyusutan} \times \text{Dasar penyusutan}$$

#### **b. Berdasarkan penggunaan**

##### **1. Metode jumlah unit produksi**

Taksiran manfaat dntakan dalam kapasitas profuksi yahng dapat dihasilkan tarif penyusutan di hitung sebagai persentase (%) produksi aktual terhadap kapasitas produksi. Dengan demikian tarif dan beban penyusutan akan bervariasi dari tahun ke tahun, tergantung produksi aktual yang dicapai pada tahun yang bersangkutan. Rumus untuk menghitung penyusutan metode jumlah unit produksi yaitu :

$$\text{Beban penyusutan / tahun} = \frac{\text{Harga perolehan (HP) – Nilai residu}}{\text{Taksiran hasil produksi (unit)}}$$

**Jurnal untuk mencatat beban penyusutan adalah :**

<b>Dr.</b> Beban penyusutan aset tetap	xxx
<b>Cr.</b> Akumulasi penyusutan aset tetap	xxx

Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam ekspektasi pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan aset tersebut.

### **3. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.**

(IAI, 2015:16.20), jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang bisa diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya, tetapi keuntungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pendapatan. Namun pada perusahaan yang kegiatan usahanya menjual aset yang sebelumnya dientalkan kepada pihak lain, maka perusahaan harus memindahkan aset tetap tersebut menjadi persediaan sesuai nilai tercatat ketika aset tidak lagi direntalkan dan menjadi aset dimiliki untuk dijual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya.



Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

1. Penjualan aset tetap.
2. Berakhirnya masa manfaat aset tetap.
3. Pertukaran aset tetap.

## **2.7 Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan**

Menurut PSAK Nomor 16 (2015:16.22) menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap yaitu :

1. Dasar penilaian yang di gunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto, jika lebih dari satu dasar yang digunakan, maka jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan.
2. Metode penyusutan yang digunakan.
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
5. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode memperlihatkan penambahan, pelepasan, akuisisi penggabungan usaha, penurunan nilai tercatat, penyusutan, perbedaanan pertukaran neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing dan mengklasifikasikan kembali.

Koreksi Kesalahan pencatatan dalam Laporan Keuangan, (Keiso, Weygandt, & Warfield, 2008) :

1. Perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi-estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. Contoh: penggunaan tarif penyusutan yang secara jelas tidak realistis.
2. Kelalaian, seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menanggihkan beban atau pendapatan tertentu pada akhir periode.
3. Penggunaan fakta yang tidak benar, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus.
4. Klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan bukan sebagai aset.

## 2.8 Konsep Penilaian Aktiva Tetap.

Hendriksen (1997) mengemukakan aktiva tetap berwujud dinilai berdasarkan *input value* karena nilai tersebut merupakan nilai yang paling relevan dalam penilaian aktiva tetap. *Input value* dapat mewakili nilai minimum dari jasa-jasa aktiva perusahaan di masa mendatang. Terdapat beberapa konsep input valuation yang diterapkan pada penilaian aktiva tetap berwujud, yaitu: *Historical input value, Historical cost, Prudent Cost, Original Cost, Current Input value, Current cost, Appraisal value, dan Fair value*

## 2.9 Konsep Penilai Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No.16.

Menurut PSAK No.16 (IAI, 2009) apabila perusahaan memilih model biaya dalam penilaian aktiva tetap yang dimilikinya maka nilai tercatat dari aktiva tetap adalah sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Model biaya ini dikenal juga dengan *historical cost* dalam penilaian aktiva tetap. Menurut PSAK No.16 (IAI, 2009) bagi perusahaan yang menerapkan model revaluasi maka aktiva tetap dicatat sebesar nilai wajar aktiva pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi pada tanggal revaluasi. Nilai wajar biasanya ditentukan berdasarkan *market-based evidence* yang dilakukan oleh penilai independen yang profesional. Penilaian model *revaluation* atau dikenal juga dengan *fair value* model ini lebih pragmatis dibandingkan dengan *cost model*. Secara konseptual model ini lebih baik namun memiliki kelemahan praktis dibandingkan dengan *cost model*. Disamping kelemahan praktis, *fair value* model memiliki kelemahan dari sisi alat bukti.

Pencatatan *fair value* atau revaluasi dapat dilakukan dengan dua teknik pencatatan antara lain : (1) penyajian kembali dilakukan secara proporsional terhadap nilai tercatat bruto aktiva sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai revaluasi, dan (2) eliminasi dilakukan terhadap nilai tercatat bruto dan nilai tercatat neto disajikan kembali sehingga sama dengan nilai revaluasi (PSAK 16, IAI 2009

dan Douppnik, 2009).

Menurut PSAK No.16 perlakuan akuntansi untuk surplus revaluasi adalah sebagai berikut: (1). Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Jika sebelumnya diakui penurunan nilai aset akibat revaluasi dalam laporan laba rugi maka kenaikan harus diakui dalam laporan laba rugi. (2). Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Selama penurunan tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut maka penurunan nilai akibat revaluasi langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. (3). Surplus revaluasi aset tetap yang telah disajikan dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. (4). Sebagian surplus revaluasi dapat dipindahkan ke saldo laba sejalan dengan penggunaan aset oleh perusahaan yaitu sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut.

## 2.10 Pengertian Fair Value Asset

Dewan Standar Keuangan Internasional memberikan *statement*, bahwa *fair value* merupakan satu-satunya konsep yang relevan dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan (Epstein & Jermakowicz, 2010):

1. Akuntansi *fair value* dapat meningkatkan transparansi atas informasi yang disampaikan kepada publik.
2. Informasi *fair value* adalah informasi utama dalam keadaan ekonomi saat ini.
3. *Fair value*, akan memberikan informasi yang lebih *real* bagi investor.

Berdasarkan *FASB Concept Statement No.7*, disimpulkan bahwa *fair value* adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan di pasar dan tanggal pengukuran (Perdana, 2011). Dari sudut pandang penyusun standar, SFAS 157 dan IFRS 13 menyatakan *Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in orderly transaction between market participants at the measurement date* (IASB, 2009).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa *fair value* adalah harga yang akan diterima untuk penjualan aset atau pembayaran sebuah kewajiban dalam transaksi yang teratur antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Meminjam istilah Suwardjono (2008; p. 475), *fair value* adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu obyek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan.

IAI dalam buletin teknis no.3, Paragraf PA 84 menyatakan bahwa, dasar dari definisi *fair value* adalah Asumsi bahwa entitas merupakan unit yang akan beroperasi selamanya tanpa ada intensi atau keinginan untuk melikuidasi, untuk membatasi secara material skala operasinya atau transaksi dengan persyaratan yang merugikan.

Dengan demikian, *fair value* bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan. Nilai adalah nilai yang wajar mencerminkan kualitas kredit suatu instrumen. Nilai

### **2.11 Penetapan Nilai Wajar (Fair Value) berdasarkan PSAK No.16**

Pengukuran nilai yang dapat diperoleh kembali dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menghitung harga jual neto dan nilai pakai (PSAK 16, IAI, 2015). Cara pertama lebih menekankan pada harga pasar sekarang atau *current value*, sedangkan cara kedua penekanannya pada nilai pakai dari sisa umur aktiva tersebut dengan menggunakan konsep *present value*. Kieso (2008,535) mengemukakan pengukuran nilai yang dapat diperoleh kembali berdasarkan nilai pasar atau *market value* apabila aset diperdagangkan, namun jika aset tersebut tidak diperdagangkan maka menggunakan *present value of expected future net cash flow* dapat dibenarkan. Harga jual neto merupakan harga jual pasar yang aktif disesuaikan dengan tambahan biaya yang dapat dibebankan secara langsung pada penghentiannya jika aset diperdagangkan di pasar.

Penaksiran nilai pakai aset meliputi tahap berikut ini (IAI, 2015): (1) Penaksiran arus kas masuk dan arus kas keluar di masa depan dari pemakaian dan penghentian aset tersebut; dan (2) Penerapan tarif diskonto yang memadai. Taksiran arus kas masuk hanya mencerminkan arus kas masuk yang berhubungan dengan aset yang diakui pertama kali atau bagian yang tersisa dari aset jika sebagian dari aset telah digunakan atau dijual. Proyeksi arus kas keluar meliputi biaya *overhead* yang dapat dibebankan atau dialokasikan dengan dasar yang handal dan konsisten pada penggunaan aset.

Tarif diskonto harus ditetapkan atas dasar tarif diskonto pasar sebelum pajak yang menunjukkan taksiran sekarang mengenai nilai waktu uang dan resiko spesifik yang terkait dengan aset bersangkutan (IAI, 2015). Tarif diskonto tidak bergantung pada struktur modal perusahaan karena nilai kembali yang diharapkan dari aset perusahaan tidak bergantung pada cara perusahaan membiayai aset tersebut. Meskipun model revaluasi diterapkan pada penilaian aset, namun penerapan ini tidak berpotensi melanggar prinsip konservatisme. Hal ini disebabkan kenaikan nilai aset tidak diakui sebagai keuntungan namun diakui sebagai akun ekuitas yaitu modal penilaian kembali atau revaluation reserve. Pada saat harga turun, kedua model memberikan hasil pengukuran yang sama, namun pada saat harga naik, hasil pengukuran aset kedua model ini berbeda. Meskipun terjadi perbedaan pengukuran aset pada saat harga naik, namun pengukuran laba kedua model memberikan hasil yang sama. Dengan demikian tidak ada pelanggaran dalam prinsip konservatif yang dianut dalam akuntansi.

## **2.12 Dampak *Revaluation* atau *Fair Value Model* terhadap Laporan Keuangan.**

Penerapan model revaluasi dalam penilaian aktiva tetap memberikan dampak terhadap laporan keuangan yang disajikan. Dampak tersebut dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1 Dampak *revaluation model* terhadap laporan keuangan

	Aset	Hutang	Ekuitas	Laba(Rugi)
Kenaikan aktiva tetap setelah revaluasi	naik	tetap tetap	naik	tetap turun (rugi)*
Penurunan aktiva tetap setelah revaluasi	turun		turun	

(\*) pada laporan laba rugi akan diakui rugi selama saldo surplus revaluasi sama dengan

### 2.13 Penelitian terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Susanti, 2012	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Terhadap PSAK No 16 Pada Samudera Indonesia Hang tuaH Tanjung	Dependen: Perlakuan akuntansi aset tetap Independen: psak	Perlakuan Akuntansi aset tetap di Samudera Indonesia tidak sesuai terhadap PSAK No 16
2.	Sari, 2011	Analisis penerapan <i>fair value based</i> pada aktiva tetap – studi kasus pada PT Pembangunan Jaya	Dependen: Aktiva tetap Independen: <i>fair value based</i>	Penilaian aktiva tetap yang dilakukan PT. Pembangunan Jaya Ancol sesuai dengan PSAK No. 16
3.	Gunawan, 2015	Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No 16 Pada Glory Futsal	Dependen: Aktiva tetap Independen: PSAK No. 16	Kebijakan akuntansi aset tetap tidak sesuai dengan PSAK No 16
	Laily, YR	Pengaruh Penerapan Konvergensi IFRS Terhadap Penilaian Aset Dengan Menggunakan		Konfergensi IFRS memberikan pengaruh akuntansi diantaranya dalam hal pengukuran dan penilaian persediaan.

### 2.14 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan dan

dikolaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada situasi masalah dan diidentifikasi (Sekaran, 2006 dalam Sefiana, 2014).

Populasi yang digunakan adalah perusahaan *manufaktur* tahun 2014-2016, variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fair value asset*. Sedangkan variabel independen (X) yang digunakan adalah PSAK No. 16.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

